

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI IX DPR RI (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

---

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2. Pimpinan DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra 3. Kepala Kantor PT. Askes Regional DKI Jakarta
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 27 Pebruari 2007
Waktu	: Pukul 14. <sup>35</sup> – 16. <sup>00</sup> WIB
Ketua Rapat	dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membahas kesehatan masyarakat miskin di DKI Jakarta
Anggota yang hadir	: Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin.

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra dan Kepala Kantor PT. Askes Regional DKI Jakarta dibuka pukul 14.<sup>35</sup> WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan penyampaian susunan acara oleh Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan penyampaian Paparan.

#### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta  
Klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah mengenai pasien keluarga miskin biasanya tidak dibayar sepenuhnya oleh ASKES, sehingga hal ini menyebabkan RSUD enggan melayani pasien korban miskin.  
Usul : Khusus DKI Jakarta mengenai premi agar dibedakan dengan daerah lain.  
Bagi warga DKI yang mempunyai kartu Gakin jika berobat tidak dipungut biaya sama sekali, sedangkan yang tidak mempunyai kartu Gakin jika berobat akan diberikan surat keterangan tidak mampu akan tetapi dikenai biaya seringan-ringannya sampai dibebaskan sama sekali.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta  
Sasaran Kepesertaan JPK Gakin, penduduk DKI Jakarta yang mempunyai :
  - Kartu JPK GAKIN
  - Kartu kompensasi BBM (KKB/BLT/BTB)
  - Panti sosial/rumah singgah yang bersertifikat
  - Orang terlantar yang diusulkan dinas bintal kesos
  - Orang terlantar DKI Jakarta

- Korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Pasien miskin penderita thalasemia (thalasemia RSCM)
- Pasien miskin yang diusulkan jantung anak Indonesia
- Pasien dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) verifikasi
- Miskin dan kurang mampu
- Kader aktif yang mengabdikan diri lebih dari 5 tahun
- Masyarakat yang mengalami kendala biaya kesehatan
- Korban bencana/KLB

Data peserta JPK GAKIN menggunakan data kemiskinan kemiskinan BPS DKI JKT Tahun 2003 (Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 271 Tahun 2002) yang diverifikasi oleh Tim Desa (Lurah dan Puskesmas).

Masalah :

- Di dalam evaluasi, ternyata sasaran Gakin belum pas, sehingga masih banyak Gakin yang berobat ke RS/Puskesmas belum mempunyai Kartu Gakin.
- Pasien membikin SKTM ketika akan pulang dari Rumah Sakit sehingga menyulitkan administrasi klaim jaminan kesehatan, apalagi pasien dari luar DKI.

Solusi

- Yang belum mempunyai Kartu Gakin disarankan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Rt/Rw & Lurah.

Pembiayaannya :

- SKTM dengan verifikasi miskin : bebas biaya 100%
- SKTM dengan verifikasi kurang mampu : Keringanan sampai dengan pembebasan

- Adanya SK Menkes tentang Askeskin, Tahun 2005 DKI membuat kesepakatan dengan PT. Askes terutama tentang kepesertaan yang dijamin.

Semua pasien dengan KTP DKI baik yang punya kartu Gakin atau SKTM dijamin Pemda DKI.

Pasien dari luar DKI, penduduk DKI yang tidak punya KTP dijamin PT. Askes.

### 3. ASKESKIN

Kepesertaan :

- Jumlah sasaran kepesertaan sesuai dengan Keputusan Menkes RI No. 332/Menkes/SK/V/2006
- Jumlah sasaran masyarakat miskin DKI sebesar 881.216 jiwa.
- Jumlah kartu yang sudah didistribusikan kepada masyarakat DKI sebanyak 2869 jiwa pada saat kunjungan Menkes ke tanah merah KP Beting Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja.

Sosialisasi Askeskin

- Sosialisasi kepada PPK (Puskesmas dan Rumah Sakit) telah dilaksanakan bersama dengan dinas kesehatan baik tingkat provinsi maupun Kotamadya
- Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bekerja sama dengan LSM

Pelayanan Kesehatan :

- Dalam tahun 2006 PT. Askes Regional IV melayani peserta Askeskin dari luar wilayah DKI yang dirujuk ke PPK di wilayah DKI.
- Pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Askeskin berpedoman kepada pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) tahun 2006.
- Realisasi biaya pelayanan kesehatan dalam tahun 2006 adalah :
 

RJTL	: 60.812 kasus dan biaya Rp. 15.659.157.138
RITL	: 12.610 kasus dan biaya Rp. 34.928.053.455
Obat	: 10.202.704.430
- PT. Askes telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah, TNI/POLRI dan beberapa Rumah Sakit Swasta di wilayah Provinsi DKI.

### III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dan usul/saran dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua rapat membacakan rangkuman, yaitu :

1. Komisi IX DPR RI memahami kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka otonomi daerah terutama dalam bidang kesehatan. Mengingat kemampuan APBD DKI Jakarta yang besar, maka Komisi IX DPR RI menghimbau Pemerintah DKI untuk mengambil kebijakan penggratisan kelas III tanpa melihat status ekonomi masyarakat yang berdomisili di DKI.
2. Komisi IX DPR RI memperhatikan bahwa membatasi pelayanan kesehatan pada orang miskin yang telah ditetapkan akan mengalami hambatan kepada orang yang belum tercantum sebagai miskin tetapi karena sesuatu hal (bencana) menyebabkan orang tersebut jatuh miskin. Karena belum terdaftar sebagai penduduk miskin maka orang yang baru jatuh miskin tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah DKI untuk menambahkan premi askeskin dari pusat agar pelaksanaan Askeskin lebih sinergis untuk kebijakan nasional dan tetap terakomodir kekhasan tiap daerah.
4. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah DKI untuk menunjukkan lembaga khusus atau lembaga pemerintah lainnya yang dapat menentukan persentase bayar oleh masyarakat yang tergolong SKTM.
5. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan Askeskin yang berlaku di DKI Jakarta.

Rapat ditutup pukul 16.<sup>30</sup> WIB

Jakarta, 27 Pebruari 2007

KOMISI IX DPR RI  
K E T U A,

**dr. RIBKA TJIPTANING**